

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut.

5.1 Kesimpulan

1. Dari hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
 - Jenis Usaha yang dominan dikelola oleh koperasi sekunder KP-RI adalah simpan pinjam dan perdagangan. Sedangkan jenis usaha lainnya adalah kaplingan tanah/perumahan, apotek, hotel/wisma, penyewaan ruangan, jasa angkutan, SPBU, wartel dan percetakan.
 - Mayoritas koperasi sekunder KP-RI memiliki aset sebesar < Rp.1 miliar. Sedangkan dalam pencapaian volume usaha, mayoritas koperasi sekunder KP-RI hanya mampu memperoleh volume usaha < Rp.1 miliar per tahun. Atas dasar pencapaian volume usaha yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas koperasi sekunder KP-RI masih tergolong dalam kelompok usaha kecil. Kecilnya kepemilikan aset dan volume usaha menyebabkan kecilnya SHU yang dapat dicapai. Mayoritas koperasi sekunder KP-RI hanya mampu memperoleh SHU < Rp.100 juta per tahun.

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis baik secara simultan maupun secara parsial, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Secara parsial, penerapan manajemen stratejik yang meliputi analisis lingkungan, penyusunan strategi, pelaksanaan strategi dan evaluasi strategi *berpengaruh positif dan signifikan* terhadap intensitas intrapreneurship koperasi sekunder KP-RI di Indonesia. Besarnya pengaruh langsung variabel manajemen stratejik terhadap intensitas intrapreneurship koperasi adalah 64%. Menurut standar Guilford, besarnya pengaruh penerapan manajemen stratejik terhadap intensitas intrapreneurship koperasi tersebut termasuk kategori "sedang".
- Secara parsial, penerapan manajemen stratejik *tidak berpengaruh secara signifikan* terhadap kinerja koperasi sekunder KP-RI di Indonesia. Besarnya pengaruh langsung variabel manajemen stratejik terhadap kinerja koperasi adalah 0,01%. Menurut standar Guilford, besarnya pengaruh penerapan manajemen stratejik terhadap kinerja koperasi tersebut termasuk kategori "sangat lemah".
- Secara parsial, intrapreneurship yang terdiri dari dimensi diversifikasi usaha dan pembaharuan organisasi *berpengaruh positif dan signifikan* terhadap kinerja koperasi sekunder KP-RI di Indonesia. Besarnya pengaruh langsung variabel intrapreneurship terhadap kinerja koperasi adalah sebesar 52%. Menurut standar Guilford, besarnya pengaruh intrapreneurship terhadap kinerja tersebut termasuk kategori "sedang".

- Secara simultan, penerapan manajemen stratejik dan intrapreneurship *berpengaruh secara signifikan* terhadap kinerja koperasi sekunder KP-RI di Indonesia. Besarnya pengaruh kedua variabel ini terhadap kinerja koperasi adalah sebesar 52%. Menurut standard Guilford, besarnya pengaruh kedua variabel tersebut termasuk dlam kategori "sedang".

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan pada Bab IV dan dari kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut.

5.2.1 Saran Akademik

- (1) Bagi para peneliti yang berminat untuk mendalami bidang manajemen stratejik, intrapreneurship dan kinerja pada koperasi disarankan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan kausal antara ketiga variabel dengan menggunakan metode yang sama pada koperasi sekunder jenis lainnya atau pada badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Hal ini akan berguna untuk menguji keberlakuan model hubungan kausal dalam disertasi ini secara lebih luas.
- (2) Mengingat hasil penelitian ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel lain terhadap variabel kinerja, yaitu sebesar 47%, maka diharapkan ada penelitian lanjutan yang mengkaji variabel-variabel lain. Diantara Variabel lain tersebut adalah tipe kepemimpinan, sumberdaya internal, komitmen organisasi, tingkat persaingan usaha, dan kebijakan pemerintah.

5.2.2 Saran Bagi Pengurus Koperasi Sekunder KP-RI

- (1). Perlu ada pembatasan masa jabatan pengurus koperasi sekunder KP-RI, yaitu maksimal 2 periode berturut-turut. Pembatasan ini perlu diakomodasi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi. Pembatasan masa jabatan pengurus akan memberi peluang adanya pembaharuan dalam berbagai aspek dalam koperasi.
- (2). Pengurus koperasi sekunder KP-RI perlu melakukan diversifikasi, differensiasi, dan inovasi usaha dan pengelolaannya diserahkan kepada manajer profesional. Selain itu, perlu adanya keterkaitan usaha antara koperasi sekunder dengan KP-RI yang ada di wilayah kerjanya. Keterkaitan usaha akan menghindari adanya persaingan usaha antara koperasi sekunder dengan KP-RI.
- (3). Pengurus koperasi sekunder KP-RI perlu melakukan kemitraan usaha dengan badan usaha jenis lainnya, yaitu BUMN dan BUMS. Kemitraan usaha diperlukan karena koperasi sekunder KP-RI memiliki banyak keterbatasan sumberdaya internal.

5.2.3 Saran Bagi Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah perlu memberi dukungan permodalan dalam bentuk kredit dana bergulir bagi pengembangan usaha koperasi sekunder KP-RI, agar koperasi ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, yang pada gilirannya dapat membina KP-RI dan meningkatkan kesejahteraan PNS sebagai anggota perorangan.

(2) Pemerintah daerah perlu melibatkan pengurus koperasi sekunder KP-RI dalam merumuskan kebijakan pengembangan koperasi di daerah masing-masing.